



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI JAWA BARAT**

SELASA, 21 NOVEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

Persiapan dan kesiapan untuk pemilu 2024 sangat ditentukan terselenggaranya berbagai tahapan pemilu dengan baik dan dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah. Untuk itulah, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait kesiapan tahapan pemilu 2024, maka dalam masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini kembali Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilu serentak tahun 2024 itu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengingat waktu pemungutan suara (14 Februari 2024) yang semakin dekat, maka Komisi II DPR RI menjalankan tugas untuk memantau dan mengevaluasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 tersebut, dari pusat hingga ke daerah. Atas dasar itu, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Tengah terkait agenda tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun persiapan agenda tahapan yang akan datang seperti kampanye dan pengadaan logistik pemilu.

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Pada tahapan kampanye ini pula secara bersamaan KPU di setiap tingkatan melaksanakan proses pengadaan dan distribusi logistic untuk penyelenggaraan pemilu 2024.

Kunjungan kerja spesifik dalam persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan termasuk bagaimana dukungan atau fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti apa kendala yang dihadapi, dan bagaimana mitra memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah berjumlah 21 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Saan Mustopa, M.Si.**, dari Fraksi Partai NasDem beserta anggota Tim terdiri dari:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/F-P Nasdem
2.	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDIP
3.	A-195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.	Anggota/ F-PDIP
4.	A-186	Paryono, S.H., M.H.	Anggota/ F-PDIP
5.	A-248	Hj. Aida Muslimah, S.E.	Anggota/ F-PDIP
6.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDIP

7.	A-165	H. Yadi Srimulyadi	Anggota/ F-PDIP
8.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
9.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-P Golkar
10.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/ F-P Golkar
11.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-P Gerindra
12.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/ F-P Gerindra
13.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M	Anggota/ F-P Nasdem
14.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-P Nasdem
15.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M.	Anggota/ F-PD
16.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-PD
17.	A-525	Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.	Anggota/ F-PD
18.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/ F-PKS
19.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
20.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
21.	A-490	Khairul Muhtar, S.E., M.M.	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
22.	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kabag Set.Kom II
23.	-----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
24.	-----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
25.	-----	M. Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
26.	-----	Salman Nasution	Tenaga Ahli Komisi II
27.	-----	Rachmawati	Tenaga Ahli Komisi II
28.	-----	Moh. Rizki Nugroho	Medsos
29.	-----	Marlina Tampubolon	TV Parlemen

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dan Media Sosial DPR RI, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI.

II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 di Grhadhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, dengan menghadirkan Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., beserta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, serta Sentra Gakkumdu Jawa Tengah.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Sambutan Pimpinan Rombongan Bapak Saan Mustopa, M.Si.,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama Komisi II DPR RI izinkanlah saya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para mitra terkait lainnya dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Tengah ini, mulai dari koordinasi, penyambutan, sampai dengan terselenggaranya pertemuan ini. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengemban tugas negara.

Perlu kami sampaikan bahwa pada kunjungan spesifik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 -2024 ini, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Sumatera Utara. Maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ini adalah, Komisi II DPR RI ingin melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kesiapan dan Persiapan setiap Tahapan Pemilu dan selain itu juga persiapan tahapan Pilkada serentak 2024 yang dijalankan oleh Pemda, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hal ini penting bagi kesuksesan Pemilu serentak 2024 nanti sehingga dapat berjalan jujur dan adil, langsung, bebas dan rahasia serta dapat berjalan aman dan damai serta Penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Untuk itu perkenalkan kami mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terhadap perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024 saat ini diantaranya:

- Perkembangan perekaman, pencetakan, penyediaan blangko, fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dan jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Provinsi Jawa Tengah, apakah sudah bersih dari Pemilih Ganda, Pemilih yang tidak punya KTP elektronik, Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri, Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum dan Pemilih yang sudah berpindah domisili
- Terkait dengan Kebijakan dan terobosan Pemkab Jawa Tengah dalam menjamin Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
- Terkait dengan Verifikasi Caleg yang dijalankan oleh KPU Jawa Tengah pada masa Pencermatan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Apakah ada Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri dalam masa Pencermatan sebelum Penetapan DCT serta proses pengantian Caleg tersebut, apakah ada permasalahan yang terjadi.
- Terkait Distribusi Logistik yang sudah diterima dari KPU RI dan terkait Pengadaan Perlengkapan untuk Pemungutan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah.
- Persiapan dan kesiapan menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Meninggal Tahapan Kampanye hanya berdurasi 75 Hari, Bagaimana persiapan Pelaksanaan dan pembagian Jadwal Kampanye Calon Legislatif DPR, DPD dan DPRD serta Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Juga terkait dengan Himbauan Bawaslu tanggal 4 sampai dengan 27 November

2023 Dilarang Kampanye Bagi Peserta Pemilu dan Caleg untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal tahapan kampanye dimulai,

- Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Provinsi/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD, Bagaimana dengan perencanaan program dan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Apakah Pemda sudah mengalokasi Anggarannya masuk dalam APBD. Apakah sudah ada penanda tangan NPHD antara KPU, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang telah kami sampaikan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Sentra Gakkumdu Jawa Tengah.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

1.Data Penduduk Jawa Tengah

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
	Kode	Nama	19.089.428	18.859.806	37.949.234
1	33.01	CILACAP	1.023.993	998.814	2.022.807
2	33.02	BANYUMAS	932.587	917.369	1.849.956
3	33.03	PURBALINGGA	527.451	512.658	1.040.109
4	33.04	BANJARNEGARA	536.381	518.423	1.054.804
5	33.05	KEBUMEN	723.556	703.276	1.426.832
6	33.06	PURWOREJO	404.150	402.224	806.374
7	33.07	WONOSOBO	474.477	455.440	929.917
8	33.08	MAGELANG	666.868	657.888	1.324.756

9	33.09	BOYOLALI	549.612	550.070	1.099.682
10	33.10	KLATEN	642.138	649.023	1.291.161
11	33.11	SUKOHARJO	454.100	454.127	908.227
12	33.12	WONOGIRI	537.715	536.759	1.074.474
13	33.13	KARANGANYAR	472.173	474.994	947.167
14	33.14	SRAGEN	504.840	507.654	1.012.494
15	33.15	GROBOGAN	757.655	749.501	1.507.156
16	33.16	BLORA	458.357	457.456	915.813
17	33.17	REMBANG	330.025	325.740	655.765
18	33.18	PATI	678.575	687.941	1.366.516
19	33.19	KUDUS	435.733	435.836	871.569
20	33.20	JEPARA	632.683	624.897	1.257.580
21	33.21	DEMAK	627.201	616.179	1.243.380
22	33.22	SEMARANG	534.203	536.376	1.070.579
23	33.23	TEMANGGUNG	408.986	402.812	811.798
24	33.24	KENDAL	541.712	535.947	1.077.659
25	33.25	BATANG	420.909	414.259	835.168
26	33.26	PEKALONGAN	512.332	496.359	1.008.691
27	33.27	PEMALANG	796.518	770.528	1.567.046
28	33.28	TEGAL	867.468	837.232	1.704.700
29	33.29	BREBES	1.039.344	1.010.278	2.049.622
30	33.71	KOTA MAGELANG	63.276	64.876	128.152
31	33.72	KOTA SURAKARTA	289.017	297.149	586.166
32	33.73	KOTA SALATIGA	99.623	101.115	200.738
33	33.74	KOTA SEMARANG	837.733	855.302	1.693.035
34	33.75	KOTA PEKALONGAN	160.856	156.679	317.535
35	33.76	KOTA TEGAL	147.181	144.625	291.806
Jumlah Total			19.089.428	18.859.806	37.949.234

Sesuai dengan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, secara garis besar, Dinas Dukcapil Provinsi mempunyai tugas dan fungsi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan capaian perekaman, Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk melaksanakan program kegiatan jemput bola di lingkungan SMA sederajat di Jawa Tengah, dan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui surat No. 470.0/635 tanggal 24 Februari 2023 hal Perekaman KTP-el di SMA & SMK di Jawa Tengah.

Kemudian dengan Kanwil Kemenag Jateng melalui surat No. 470.0/644 tanggal 26 Februari 2023 hal Perekaman KTP- el di Madrasah Aliyah di Jawa Tengah. Dan sudah terekam sejumlah 487.992 dari data DP4 Pemilih Pemula sejumlah 821.251 atau sebesar 59,42% pemilih pemula yang sudah terekam.

**PROGRES PEREKAMAN DP4 PEMILIH PEMULA
PERIODE OKTOBER- NOVEMBER 2023**

N O	KAB. / KOTA	DP4 PEMULA	30 OKT			15 NOV			PROG RES REKA M
			REKA M	BELU M	%	REKA M	BELU M	%	
33	JAWA TENGAH	821.251	455.90 5	365.34 6	55,5 1	487.99 2	333.25 9	59,4 2	32.087
330 1	KAB. CILACAP	43.779	25.699	18.080	58,7 0	27.356	16.423	62,4 9	1.657
330 2	KAB. BANYUMAS	39.618	24.719	14.899	62,3 9	25.778	13.840	65,0 7	1.059
330 3	KAB. PURBALINGG A	22.805	11.640	11.165	51,0 4	12.569	10.236	55,1 2	929
330 4	KAB. BANJARNEGA RA	22.505	9.836	12.669	43,7 1	10.523	11.982	46,7 6	687
330 5	KAB. KEBUMEN	30.636	15.170	15.466	49,5 2	16.263	14.373	53,0 8	1.093
330 6	KAB. PURWOREJO	5.044	3.047	1.997	60,4 1	3.288	1.756	65,1 9	241
330 7	KAB. WONOSOBO	19.271	8.759	10.512	45,4 5	9.637	9.634	50,0 1	878
330 8	KAB. MAGELANG	34.716	16.204	18.512	46,6 8	17.095	17.621	49,2 4	891
330 9	KAB. BOYOLALI	23.914	13.251	10.663	55,4 1	13.734	10.180	57,4 3	483

3310	KAB. KLATEN	30.376	18.108	12.268	59,61	19.255	11.121	63,39	1.147
3311	KAB. SUKOHARJO	20.030	12.137	7.893	60,59	12.642	7.388	63,12	505
3312	KAB. WONOGIRI	21.338	16.024	5.314	75,10	17.067	4.271	79,98	1.043
3313	KAB. KARANGANYAR	19.368	9.755	9.613	50,37	11.031	8.337	56,95	1.276
3314	KAB. SRAGEN	24.764	12.469	12.295	50,35	13.165	11.599	53,16	696
3315	KAB. GROBOGAN	30.615	17.631	12.984	57,59	21.292	9.323	69,55	3.661
3316	KAB. BLORA	21.586	11.033	10.553	51,11	11.674	9.912	54,08	641
3317	KAB. REMBANG	15.830	12.187	3.643	76,99	12.477	3.353	78,82	290
3318	KAB. PATI	28.019	12.510	15.509	44,65	14.183	13.836	50,62	1.673
3319	KAB. KUDUS	16.175	10.282	5.893	63,57	10.972	5.203	67,83	690
3320	KAB. JEPARA	29.335	13.682	15.653	46,64	14.745	14.590	50,26	1.063
3321	KAB. DEMAK	28.356	16.145	12.211	56,94	16.515	11.841	58,24	370
3322	KAB. SEMARANG	23.436	10.551	12.885	45,02	11.227	12.209	47,90	676
3323	KAB. TEMANGGUNG	16.747	11.121	5.626	66,41	11.897	4.850	71,04	776
3324	KAB. KENDAL	19.716	14.337	5.379	72,72	15.154	4.562	76,86	817
3325	KAB. BATANG	18.170	11.027	7.143	60,69	12.338	5.832	67,90	1.311
3326	KAB. PEKALONGAN	23.699	12.924	10.775	54,53	14.187	9.512	59,86	1.263
3327	KAB. PEMALANG	35.066	18.549	16.517	52,90	19.924	15.142	56,82	1.375
3328	KAB. TEGAL	38.825	16.277	22.548	41,92	17.411	21.414	44,84	1.134
3329	KAB. BREBES	46.620	20.363	26.257	43,68	21.246	25.374	45,57	883
3371	KOTA MAGELANG	2.058	1.919	139	93,25	1.928	130	93,68	9
3372	KOTA SURAKARTA	10.352	8.449	1.903	81,62	8.541	1.811	82,51	92

337 3	KOTA SALATIGA	3.986	2.982	1.004	74,8 1	3.07 6	910	77,17	94
337 4	KOTA SEMARANG	39.021	28.369	10.65 2	72,7 0	30.45 1	8.570	78,04	2.082
337 5	KOTA PEKALONGA N	8.441	4.655	3.786	55,1 5	5.08 9	3.352	60,29	434
337 6	KOTA TEGAL	7.034	4.094	2.940	58,2 0	4.26 2	2.772	60,59	168

**Sumber data PDAK Kemendagri*

Berikutnya, Per- tanggal 15 November 2023, jumlah perekaman KTP-el sebanyak 28.402.165 (99.56%) sedangkan jumlah pencetakan KTP-el sebanyak 28.192.229 (98.83%) dari jumlah wajib KTP-el sebanyak 28.526.749. (sumber:datasipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id).

Capaian Perekaman KTP-el di Provinsi Jawa Tengah per 15 November 2023

N O	KAB. / KOTA	WAJIB KTP- EL	PEREKAMAN	
			JUMLAH	%
1	2		3	
33	JAWA TENGAH	28.526.74 9	28.402.165	99,56
337 2	KOTA SURAKARTA	445.605	448.059	100,55
332 5	KAB. BATANG	619.413	620.995	100,26
332 6	KAB. PEKALONGAN	735.255	736.363	100,15
337 1	KOTA MAGELANG	99.153	99.081	99,93
337 6	KOTA TEGAL	210.947	210.711	99,89
330 1	KAB. CILACAP	1.533.412	1.530.354	99,80
332 4	KAB. KENDAL	817.292	815.658	99,80
331 8	KAB. PATI	1.049.540	1.047.329	99,79
330 3	KAB. PURBALINGGA	773.802	772.116	99,78
332 7	KAB. PEMALANG	1.151.362	1.148.698	99,77
330	KAB. PURWOREJO	620.265	618.744	99,75

6				
3305	KAB. KEBUMEN	1.077.134	1.074.209	99,73
3323	KAB. TEMANGGUNG	615.489	613.854	99,73
3320	KAB. JEPARA	931.274	928.591	99,71
3302	KAB. BANYUMAS	1.402.066	1.397.886	99,70
3304	KAB. BANJARNEGARA	789.144	786.720	99,69
3328	KAB. TEGAL	1.250.724	1.246.826	99,69
3321	KAB. DEMAK	907.889	904.590	99,64
3308	KAB. MAGELANG	1.009.315	1.005.267	99,60
3315	KAB. GROBOGAN	1.129.847	1.124.065	99,49
3309	KAB. BOYOLALI	828.223	823.948	99,48
3310	KAB. KLATEN	991.215	985.890	99,46
3312	KAB. WONOGIRI	840.462	835.825	99,45
3329	KAB. BREBES	1.509.097	1.500.735	99,45
3374	KOTA SEMARANG	1.256.273	1.249.381	99,45
3311	KAB. SUKOHARJO	691.579	687.553	99,42
3322	KAB. SEMARANG	810.743	805.801	99,39
3317	KAB. REMBANG	499.679	496.541	99,37
3319	KAB. KUDUS	644.671	640.403	99,34
3307	KAB. WONOSOBO	699.441	694.664	99,32
3313	KAB. KARANGANYAR	715.817	709.758	99,15
3373	KOTA SALATIGA	149.194	147.878	99,12
3316	KAB. BLORA	715.432	706.358	98,73
3314	KAB. SRAGEN	771.430	760.375	98,57
337	KOTA PEKALONGAN	234.565	226.939	96,75

5				
---	--	--	--	--

Kendala yang dihadapi:

Kurangnya pemahaman pihak sekolah SMA/SMK terhadap pentingnya perekaman KTP-el untuk pemula sehingga pengkoordinasian dan pengerahan siswa di lokasi sekolah kurang maksimal, serta kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti kegiatan perekaman KTP-el.

Upaya yang dilakukan:

- Kerjasama lintas sektor dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng & Kanwil Kemenag Jateng dalam hal kegiatan jemput bola perekaman di lingkungan SMA sederajat di Jawa Tengah.
- Melakukan rapat koordinasi daerah secara rutin untuk evaluasi kinerja dari masing-masing Dinas Dukcapil Kab/Kota.
- Sosialisasi perekaman KTP-el pemula di Masyarakat.

Ketersediaan dan distribusi blanko KTP-el di Provinsi Jawa Tengah

- Ketersediaan blanko KTP-el di Jawa Tengah per tanggal 15 november 2023 sebanyak 191.554 keping yang tersebar di seluruh Dinas Dukcapil Kab/Kota se Jawa Tengah.
- Saat ini kondisi blanko KTP-el di Dinas Dukcapil Kab/Kota masih mencukupi.
- Untuk pengambilan blanko KTP-el dilakukan oleh masing-masing Dinas Dukcapil Kab/Kota, Dispermades Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi sebagian distribusi blanko KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota berdasarkan data sisa stok blanko masing-masing Dinas Dukcapil Kab/Kota yang dilaporkan secara rutin melalui aplikasi SIDASI milik Provinsi yang digunakan untuk memantau stok dan distribusi blanko di Provinsi Jawa Tengah.
- Sebagai masukan untuk Pemerintah Pusat agar setiap pengambilan blanko KTP-el untuk Provinsi maupun Kab/Kota agar mendapat alokasi blanko KTP-el yang lebih besar sehingga lebih efisien dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas Ke Jakarta untuk pengambilan blanko KTP-el.
- Dispermades Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP-el mengingat tugas dan fungsi dari Dinas Dukcapil Provinsi adalah untuk fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan
- Untuk integrasi Sidalih KPU dengan SIAK merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat.

- Dispermades Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan verifikasi dan validasi data yang ditemukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah menggunakan SIAK sesuai hak akses level Provinsi yang dimiliki oleh Dispermades Provinsi Jawa Tengah.
- Inovasi Aplikasi SIDASI (Sinergitas Data dan Informasi) yang berfungsi sebagai alat pencatatan pendistribusian blangko KTP-el se Jawa Tengah.
- Inovasi Aplikasi SIPOLAHTA (Sistem Pengolahan Data) yang berfungsi sebagai alat pencatatan capaian kinerja Dinas Dukcapil Kab/Kota se Jawa Tengah.
- Saat ini SDM Dispermades Provinsi Jawa Tengah sudah memadai dalam pemanfaatan teknologi informasi serta untuk memaksimalkan layanan Dukcapil dan pelatihannya sudah difasilitasi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.

Data pemilih Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah:

- Untuk data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan, KPU Pusat telah bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Kab/Kota, sehingga pemutakhiran data saat ini berjalan dengan baik.
- Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI sejumlah 28.522.159
- Data DP4 yang dimiliki oleh Provinsi yang bersumber dari Ditjen Dukcapil adalah dalam bentuk data agregat.
- Dispermades Provinsi Jawa Tengah secara berkala mendapat data dari Ditjen Dukcapil berupa data *by name by address* DP4 belum rekam yang selanjutnya dimanfaatkan Dinas Dukcapil Kab/Kota sebagai dasar perekaman KTP-el ke sekolah.

Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kebutuhan KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam persiapan Pemilu 2024:

- Dispermades Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terhadap verifikasi dan validasi data yang belum sesuai yang ditemukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada saat pelaksanaan cokolit di lapangan.
- Dispermades Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Kemenag Kanwil Jawa Tengah dalam melaksanakan perekaman pemilih pemula di Jawa Tengah.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Dalam tahapan melaksanakan penyusunan dan pemukhtahiran data pemilih Pemilu 2024:

- a. Data pemilih Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara DP4 sebanyak 28.522.159, Data hasil sinkronisasi DP4 dengan data PDPB 2022 yang digunakan sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih sebanyak 28.508.568
- b. Perbandingan DP4 Provinsi Jawa Tengah dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir perbandingan DP4 Pemilu 2024 dengan DPT Pemilu 2019 mengalami kenaikan jumlah pemilih karena adanya penambahan pemilih pemula. DP4 Pemilu 2024 sebanyak 28.522.159 dan DPT Pemilu 2019 sebanyak 27.896.902
- c. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Jawa Tengah 28.432.762 dengan rincian Laki-laki 14.193.460 dan Perempuan 14.239.302
- d. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Provinsi Jawa Tengah? 28.350.829 dengan rincian Laki-laki 14.145.627 dan Perempuan 14.205.202
- e. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan? Bagaimana perbandingannya dengan DPT Pemilu 2019? 28.289.413 dengan rincian Laki-laki 14.113.893 dan Perempuan 14.175.520
Perbandingan antara DPT Pemilu 2024 dengan DPT Pemilu 2019 mengalami penambahan jumlah pemilih karena adanya pemilih pemula dan masukan dari masyarakat bagi yang belum terdaftar dalam DPT
- f. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Provinsi Jawa Tengah
Jumlah DPTb per Bulan Oktober 2023 sebanyak:
Pemilih Pindah Masuk sebanyak 21.254 dengan rincian Laki-laki 10.066 dan perempuan 11.188
Pemilih Pindah Keluar sebanyak 18.875 dengan rincian Laki-laki 9.015 dan perempuan 9.860
- g. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memberikan suaranya di TPS. Bagaimana persiapan dan rencana KPU Jawa Tengah terhadap Pemilih dengan Penggunaan Surat Keterangan Perekaman KTP-el
Berdasarkan PKPU Tungsura pemilih membawa KTP- el bukan bukti perekaman. Dalam Kasus blangko kosong/habis, kami mendorong penggunaan KTP – el Digital
- h. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPUD sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih

KPU Provinsi Jawa Tengah menerima data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan dari KPU RI dan sudah langsung ditindaklanjuti

Jumlah TPS keseluruhan 117.299, jumlah TPS reguler = 117.197 dan jumlah TPS Lokasi Khusus = 102

Permasalahan dalam pembentukan TPS Lokasi Khusus adalah banyaknya elemen data yang tidak lengkap (NIK dan NKK) dari pemilih lokasi khusus terutama di Lapas/Rutan

Daftar pemilih TPS Lokasi Khusus didapat dari penanggungjawab masing-masing yang mengajukan adanya pendirian TPS Lokasi Khusus diwilayahnya, kemudian oleh admin/operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diunggah kedalam aplikasi Sidalih.

Bagaimana KPU Provinsi Jawa Tengah memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan dipastikan sudah bersih dari:

- a. Data Pemilih Ganda
- b. Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik
- c. Data Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri
- d. Data Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum
- e. Data Pemilih yang sudah berpindah domisili
- f. Data Pemilih tidak dikenal
- g. Data penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum pernah kawin
- h. Data Pemilih yang sudah keluar dari TPS Khusus

Penjelasan:

- a) Data ganda dilakukan tabrak data secara berjenjang mulai dari ganda antar TPS, antar Desa/Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan dengan Luar Negeri
- b) KPU berkoordinasi dan berkerjasama dengan Dispendukcapil untuk melakukan perekaman KTP el terhadap pemilih yang belum memiliki KTP el
- c) KPU Provinsi Jawa Tengah memperoleh data alih status TNI/Polri dari KPU RI selanjutnya KPU KabKota menindaklanjuti dengan memverifikasi dilapangan dan menTMSkan apabila terbukti sudah menjadi anggota TNI/Polri
- d) Diberi tanda pemilih yang meninggal dunia sehingga pada saat pemungutan suara ybs tidak memperoleh undangan
- e) KPU melakukan pemutakhiran data dengan sistem de jure jadi pemilih tersebut terdaftar ditempat sesuai alamat KTP, apabila setelah penetapan DPT pemilih tersebut ingin pindah memilih sesuai alamat terbaru dapat mengurus DPTb pindah memilih kategori pindah domisili
- f) KPU Kabkota melakukan pengecekan data pemilih melalui aplikasi cekNIK dari Kemendagri, apabila data tersebut memang tidak dikenal, atau tidak ada didalam sistem kependudukan maka dilakukan pencoretan terhadap pemilih yang tidak dikenal tersebut

- g) KPU melakukan verifikasi dilapangan jika menemukan pemilih yang diduga dibawah usia 17 tahun yang belum pernah kawin. Bila terbukti benar dilakukan pencoretan terhadap pemilih tersebut
- h) Pemilih yang sudah keluar dari TPS lokasi khusus dimasukkan kembali ke TPS asal sesuai dengan alamat KTP el nya.

3. Netralitas ASN Jelang Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melaksanakan penandatanganan dan pengucapan ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyambut Pemilu Serentak 2024. Pengucapan Ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas tersebut diikuti oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik secara luring maupun daring, dipusatkan di Grhadika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa tanggal 26 September 2023.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2/2022, No 80-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tujuan diadakannya ikrar tersebut untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik dalam pengembangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas merupakan komitmen bersama untuk menjaga dan memelihara prinsip-prinsip etika, kejujuran dan netralitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

4. Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi senantiasa berkoordinasi jika daerah kab/kota mengalami kendala. Perihal dukungan perihal fasilitas penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat PPK dan PPS, Penugasan personil pada Pemerintah Daerah sebagai Sekretariat PPK dan PPS, Pemberian izin bagi ASN di Pemerintah Daerah untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, Penugasan personil Satlinmas, Fasilitas pemeriksaan kesehatan dan penertiban surat keterangan Badan Ad Hoc Penyelenggara, Dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan Badan Ad Hoc telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berkomitmen memberikan dukungan dan menindaklanjuti apabila ada kebutuhan yang di daerah kab kota tidak bisa dipenuhi, misal kantor sekretariat menggunakan aset Pemprov.

5. Potensi Kerawanan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah

Indeks kerawanan pemilu di Jawa Tengah dalam kategori Rawan sedang dengan skor 34,83. Adapun Kabupaten/Kota yang masuk kategori rawan tinggi ada 7 Kabupaten/Kota meliputi: Kota Semarang, Kab. Sukoharjo, Kab. Purworejo, Kab.

Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang dan Kab. Kendal.

Strategi menjaga kondusifitas dan mengantisipasi potensi permasalahan jelang pemilu telah dilakukan dengan cara memelihara kondisi damai masyarakat, penguatan forum-forum mitra, penguatan deteksi dini, pelibatan para tokoh, stakeholder, media massa dan jejaring sosial untuk menjaga kondusifitas wilayah dan membangun sistem pencegahan dini, Sinergi antar aparat dan Masyarakat dalam rangka Deteksi dini dan Cegah Dini.

Selain itu, strategi yang dilakukan dalam rangka pencegahan meliputi:

- Melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang masuk rawan tinggi dengan melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif;
- melakukan pencegahan pelanggaran kampanye dengan memproduksi konten-konten pencegahan pelanggaran kampanye berupa ILM meliputi: Netralitas ASN, TNI/Polri, Politik Uang, Hoax, Isu SARA & Ujaran Kebencian;
- Melakukan kerjasama antar lembaga dan perguruan tinggi;
- Membuat imbauan kepada KPU dan Peserta Pemilu;
- Mengembangkan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang;
- Rapat Koordinasi dengan Stakeholder;
- Mengembangkan relawan patroli cyber Bawaslu Jawa Tengah;

6. Koordinasi dan Konsolidasi dengan Berbagai Pihak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pengaman, Penyelenggara dan Pengawas Pemilu. melalui berbagai rapat koordinasi, pertemuan dan menindaklanjuti kendala dan permasalahan yang ada.

Untuk koordinasi dilakukan secara intensif, baik melalui audiensi maupun hadir dalam setiap undangan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan pihak terkait, ataupun sebaliknya.

Sementara bagi Bawaslu Kerjasama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah rutin dalam melaksanakan piket dan rapat pokja Sentra Gakkumdu. Dalam rapat pokja Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan setiap bulan membahas potensi pelanggaran pidana pemilu yang dimungkinkan terjadi pada setiap tahapan dan membahas penerapan dan pembinaan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu. Sedangkan piket Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan setiap hari merupakan salah satu bentuk dalam mempersiapkan pengawasan dan penerimaan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Pasca dikeluarkannya Perbawaslu yang terbaru tentang Sentra Gakkumdu yaitu Perbawaslu 3 Tahun 2023, Bawaslu belum menemukan kesulitan dalam menjalankan teknis penanganan tindak pidana Pemilu. Bahkan di Perbawaslu saat ini sudah memberikan kewenangan prerogatif kepada Bawaslu melalui rapat pleno Bawaslu untuk menentukan kasus dugaan yang sedang ditangani diteruskan ke penyidikan atau tidak. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya kasus dalam Pemilu sebelumnya yang berhenti di pembahasah kedua Sentra Gakkumdu.

7. NPHD Pilkada 2024

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Provinsi/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD.

Proses tahapan penganggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 telah melalui berbagai tahapan, yakni :

- a. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan bersama komponen pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada 27 Februari 2023;
- b. Penetapan Keputusan Gubernur tentang Komponen Pendanaan bersama pada 23 Mei 2023;
- c. Penandatanganan BA Kesepakatan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada 10 Agustus 2023;
- d. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah dilaksanakan pada Rabu, 15 November 2023 bertempat di Gedung A Lantai 2 Setda Provinsi Jawa Tengah

Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, dengan total keseluruhan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 985.326.500.000,00 dengan rincian Rp. 791.608.630.000,00 untuk KPU dan sebesar Rp.193.717.870.000,00 untuk Bawaslu.

Penganggaran Pilkada dapat dijelaskan sesuai lampiran tabel usulan anggaran Pilkada, bahwa 33 Kabupaten Kota dengan Provinsi telah menandatangani NPHD dan masih menunggu Pemalang dan Pati yang sedang dijadwalkan ulang oleh Pemerintah Daerah setempat.

NO.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN
1	KPU PROVINSI JAWA TENGAH	791,608,630,000
2	KPU KABUPATEN SEMARANG	45,036,122,000
3	KPU KABUPATEN KENDAL	58,000,000,000
4	KPU KABUPATEN DEMAK	

NO.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN
		47,346,900,000
5	KPU KABUPATEN GROBOGAN	50,840,000,000
6	KPU KABUPATEN PEKALONGAN	32,461,418,000
7	KPU KABUPATEN BATANG	32,300,000,000
8	KPU KABUPATEN TEGAL	52,000,000,000
9	KPU KABUPATEN BREBES	53,922,560,000
10	KPU KABUPATEN PATI	40,500,000,000
11	KPU KABUPATEN KUDUS	33,730,653,000
12	KPU KABUPATEN PEMALANG	50,500,000,000
13	KPU KABUPATEN JEPARA	46,382,000,000
14	KPU KABUPATEN REMBANG	28,000,000,000
15	KPU KABUPATEN BLORA	34,905,207,000
16	KPU KABUPATEN BANYUMAS	56,598,231,000
17	KPU KABUPATEN CILACAP	63,871,832,000
18	KPU KABUPATEN PURBALINGGA	32,000,000,000
19	KPU KABUPATEN BANJARNEGARA	32,974,980,000
20	KPU KABUPATEN MAGELANG	59,301,706,000

NO.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN
21	KPU KABUPATEN TEMANGGUNG	34,415,896,000
22	KPU KABUPATEN WONOSOBO	35,391,263,000
23	KPU KABUPATEN PURWOREJO	36,924,980,000
24	KPU KABUPATEN KEBUMEN	45,394,272,000
25	KPU KABUPATEN KLATEN	52,000,000,000
26	KPU KABUPATEN BOYOLALI	36,000,000,000
27	KPU KABUPATEN SRAGEN	39,000,000,000
28	KPU KABUPATEN SUKOHARJO	29,286,275,000
29	KPU KABUPATEN KARANGANYAR	35,000,000,000
30	KPU KABUPATEN WONOGIRI	36,117,557,000
31	KPU KOTA SEMARANG	79,764,419,000
32	KPU KOTA SALATIGA	13,020,000,000
33	KPU KOTA PEKALONGAN	12,150,000,000
34	KPU KOTA TEGAL	19,409,158,000
35	KPU KOTA MAGELANG	7,894,334,000
36	KPU KOTA SURAKARTA	28,055,338,000
		2,182,103,731,000

8. Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tahapan Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Tengah, terkait:

- a. Total jumlah Bacaleg yang awalnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi dalam Pencalonan sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS)

REKAPITULASI DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PADA SAAT PENGAJUAN AWAL

No	Jenis Pengajuan	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon BMS
1	Awal	Partai Kebangkitan Bangsa	13	120	13	107
2	Awal	Partai Gerakan Indonesia Raya	13	120	15	105
3	Awal	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	120	52	68
4	Awal	Partai Golongan Karya	13	120	0	120
5	Awal	Partai NasDem	13	120	5	115
6	Awal	Partai Buruh	11	40	4	36
7	Awal	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	13	120	0	120
8	Awal	Partai Keadilan Sejahtera	13	120	2	118
9	Awal	Partai Kebangkitan Nusantara	13	49	0	49
10	Awal	Partai Hati Nurani Rakyat	13	120	0	120
11	Awal	Partai Garda Republik Indonesia	8	27	0	27
12	Awal	Partai Amanat Nasional	13	120	1	119
13	Awal	Partai Bulan Bintang	13	120	0	120
14	Awal	Partai Demokrat	13	120	2	118
15	Awal	Partai Solidaritas Indonesia	13	120	1	119
16	Awal	PARTAI PERINDO	13	120	3	117
17	Awal	Partai Persatuan Pembangunan	13	120	11	109

No	Jenis Pengajuan	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon BMS
18	Awal	Partai Ummat	13	115	0	115
TOTAL				1911	109	1802

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA

No	Jenis Pengajuan	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon TMS
1	Pencermatan DCS	Partai Kebangkitan Bangsa	13	120	120	0
2	Pencermatan DCS	Partai Gerakan Indonesia Raya	13	120	120	0
3	Pencermatan DCS	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	120	120	0
4	Pencermatan DCS	Partai Golongan Karya	13	120	120	0
5	Pencermatan DCS	Partai NasDem	13	120	120	0
6	Pencermatan DCS	Partai Buruh	11	40	40	0
7	Pencermatan DCS	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	13	116	62	54
8	Pencermatan DCS	Partai Keadilan Sejahtera	13	120	120	0
9	Pencermatan DCS	Partai Kebangkitan Nusantara	13	49	38	11
10	Pencermatan DCS	Partai Hati Nurani Rakyat	13	114	37	77
11	Pencermatan DCS	Partai Garda Republik Indonesia	8	26	22	4
12	Pencermatan DCS	Partai Amanat Nasional	13	120	120	0
13	Pencermatan DCS	Partai Bulan Bintang	6	51	8	43
14	Pencermatan DCS	Partai Demokrat	13	120	120	0
15	Pencermatan DCS	Partai Solidaritas Indonesia	13	61	46	15
16	Pencermatan DCS	PARTAI PERINDO	13	109	98	11

17	Pencermatan DCS	Partai Persatuan Pembangunan	13	120	120	0
18	Pencermatan DCS	Partai Ummat	13	108	45	63
TOTAL				1754	1476	278

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP DPRD JATENG

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	79	41	34.17%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	79	41	34.17%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	77	43	35.83%
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR	74	46	38.33%
5	Partai NasDem	NasDem	74	46	38.33%
6	Partai Buruh	BURUH	27	13	32.5%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	37	25	40.32%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	72	48	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	20	18	47.37%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	19	17	47.22%

Verifikasi yang dijalankan oleh KPU Jawa Tengah pada masa Pencermatan sebelum Daftar Calon tetap (DCT)? Apakah ada Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri dalam masa Pencermatan?

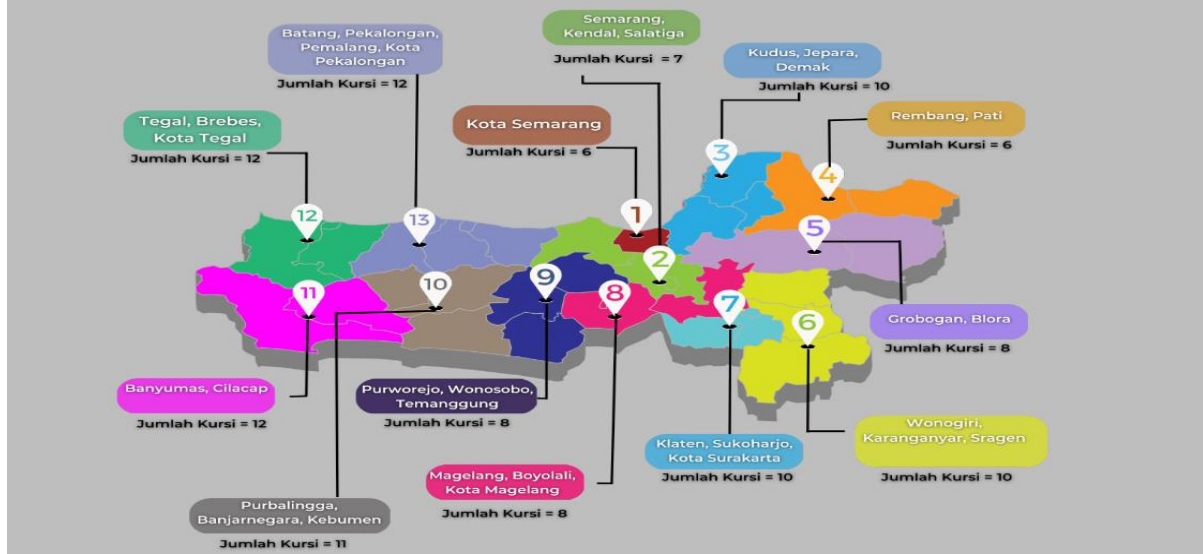
Bagaimana proses pengantian Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri:

- 1. KPU Provinsi Jawa Tengah saat pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen bakal calon pada masa pencermatan DCT membentuk 3 TIM dengan diketuai oleh ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung Jawab serta dikoordinatori oleh Kepala Bagian, verifikasi administrasi dilakukan dengan penuh tanggung Jawab dan selalu berpedoman pada PKPU 10 TAHUN 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Surat Dinas dari KPU Republik Indonesia.
- Tidak ada Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang meninggal dunia maupun yang melakukan pengunduran diri pada masa pencermatan DCS.

9. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Daerah Pemilihan dan alokasi kursi pada Provinsi Jawa Tengah tidak ada perubahan walaupun ada penambahan jumlah penduduk, jumlah dapil dan alokasi kursi tetap 13 dapil dengan jumlah kursi 120 sama dengan pemilu tahun 2019 (Dasar PKPU 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024).

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH



10. Logistik Pemilu di Jawa Tengah

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan mandat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023?

Jenis logistik yang diadakan KPU Prov Jateng

A. Tahap 1

1. Kotak suara, jumlah 587.647 buah
2. Bilik suara, jumlah 469.196 buah
3. Tinta, jumlah 234.598 botol
4. Segel, jumlah 11.275.778 keping

B. Tahap 2

1. Surat suara DPD, jumlah 28.913.406 lembar termasuk PSU 1.000 lembar
2. Surat suara DPRD Provinsi, jumlah 28.925.406 lembar termasuk PSU 13.000 lembar
3. Surat suara DPRD Kab/kota, jumlah 29.098.406 lembar termasuk PSU 186.000 lembar
4. Formulir ukuran Plano Presiden, DPR, DPD dan DPRD Prov, jumlah
5. Formulir ukuran A4 Presiden, DPR, DPD dan DPRD Prov, jumlah
6. Alat bantu tuna netra DPD, jumlah 117.299 buah
7. Sampul kertas kubus, jumlah 4.114.028 buah
8. Sampul kertas biasa, jumlah 2.349.436 buah

Logistik perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah datang dan distribusikan oleh KPU RI ke KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:

Logistik tahap 1 yang sudah datang

1. Kotak suara, 35%
2. Bilik suara, 100%
3. Tinta, 100%
4. Segel masih proses produksi

Logistik tahap 2 sedang proses produksi

Logistik yang datang sudah dilakukan pengecekan.

Persiapan infrastruktur Kantor dan Gudang KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan persiapan pelaksanaan penyimpanan logistik Pemilu dan persiapan distribusi logistik Pemilu 2024:

KPU se-Jateng telah menyiapkan gudang untuk penyimpanan logistik dan pengelolaan logistik (rakit kotak, sortir, lipat, pengesetan, pengepakan) melalui mekanisme sewa 35 KPU Kab/Kota telah memiliki gudang penyimpanan dan pengelolaan logistik dengan fasilitas Kamera Pengawas CCTV, Apar, Palet, telah dilakukan fungigasi/anti rayap, akses jalan lebar, bebas banjir, tersedia air dan listrik. Permasalahan yang ditemui KPU Kab/kota tidak memiliki gudang sendiri, namun telah dapat diselesaikan dengan metode sewa gudang maupun pinjam pakai pemerintah daerah.

11. Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 kepada Masyarakat

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat dan menjaga kondusifitas di wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan cara memelihara kondisi damai masyarakat, penguatan forum-forum mitra, penguatan deteksi dini, pelibatan para tokoh, stakeholder, media massa dan jejaring sosial untuk menjaga kondusifitas wilayah dan membangun sistem pencegahan dini, Sinergi antar aparat dan Masyarakat dalam rangka Deteksi dini dan Cegah Dini. Penindakan pelanggaran & Ketegasan Hukum.

Sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan seperti Sinergi dengan Pengaman, Penyelenggara dan Pengawas Pemilu, Kolaborasi dengan Organisasi Kepemudaaan yang ternaungi dalam Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, Ikrar Netralitas ASN yang diikuti oleh OPD dan dibacakan setiap hari senin pada saat apel pagi, Sambang kampus dengan mengajak generasi muda untuk berperan aktif mengawal pemilu 2024.

KPU Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan Sosialisasi, penguatan, pelatihan atau bimbingan teknis kepada Calon DPD dan Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan sosialisasi, pelatihan di setiap tahapan yang menggunakan aplikasi KPU, dan membuka Helpdesk bagi setiap

calon DPD dan partai peserta pemilu tahun 2024 yang membutuhkan konsultasi dan bimbingan.

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Masyarakat:

- Sosialisasi tatap muka dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada sasaran segmen pemilih meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marginal, kelompok keagamaan, warga internet, serta masyarakat umum, peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, Masyarakat adat dan instansi pemerintah.
- Sosialisasi melalui media sosial dan website KPU Provinsi Jawa Tengah secara rutin dengan menyajikan informasi, konten, materi dan berita terkait pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024. KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki akun media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube dan sudah bercentang biru.
- Pemanfaatan podcast yang dilaksanakan dua minggu sekali di ruang votecast KPU Provinsi Jawa Tengah dan mengundang narasumber dari pihak terkait dengan tema yang berkaitan dengan informasi kelembagaan, kepemiluan dan konsep demokrasi.
- Penayangan media luar ruang (Videotron) di tempat-tempat strategis berupa video sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dimana dalam penayangan video KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Polda Jateng dan Kominfo Provinsi Jateng.
- Melakukan kegiatan KPU Goes To Pesantren dan Campuss dengan tema “Nonton Bareng Film Kejarlah Janji” dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda. Dimana KPU RI telah memproduksi Film Sosialisasi Pemilu 2024 dengan judul Kejarlah Janji yang disutradarai oleh Garin Nugroho. Di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah kegiatan ini dilakukan di Pondok Pesantren Al Itqon Semarang dengan menghadirkan 300 peserta dan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan menghadirkan 1.200 peserta dimana sasarannya adalah pemilih pemula, pemilih muda dan pemilih Perempuan.
- Melakukan Kirab Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui 5 Jalur yaitu:
 1. Jalur III, dimulai Penyerahan Kirab Pemilu 2024 dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan kepada Kota Semarang, Kab. Karanganyar, Kab. Sukoharjo dan Kab. Klaten kemudian diserahkan ke Kab. Sleman, DIY.
 2. Jalur IV, dimulai Penyerahan Kirab Pemilu 2024 dari Kab. Gunung Kidul, DIY kepada Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Tegal dan Kab. Brebes kemudian diserahkan ke Kota Cirebon, Jawa Barat.
 3. Jalur V, dimulai Penyerahan Kirab Pemilu 2024 dari Kab. Ngawi, Jawa Timur kepada Kab. Sragen, Kab. Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Salatiga, Kab. Purbalingga dan Kota Tegal kemudian diserahkan ke Kab. Cirebon, Jawa Barat.
 4. Jalur VI, dimulai Penyerahan Kirab Pemilu 2024 dari Kab. Magetan, Jawa Timur kepada Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap kemudian diserahkan ke KPU RI.
 5. Jalur VII, dimulai Penyerahan Kirab Pemilu 2024 dari Kab. Bojonegoro, Jawa Timur kepada Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab.

Pekalongan dan Kab.Pemalang kemudian diserahkan ke Kab. Kuningan, Jawa Barat.

Upaya peningkatan partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah: Sosialisasi tatap muka di daerah tingkat partisipasi pemilih rendah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Melakukan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui:

1. lomba karikatur
2. lomba cipta lagu pemilu
3. anthology pemilu

Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat dengan tema:

1. Tahapan Kampanye
2. Cek DPT online
3. Hari Pemungutan Suara
4. Ajakan Moral menuju Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa
5. Pengenalan fitur dan konten laman infopemilu.kpu.go.id

Bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan dan komunitas dengan menyelenggarakan sosialisasi Pemilu tahun 2024.

Kesiapan KPU Provinsi Jawa Tengah terhadap rencana Pemerintah dan DPR untuk memajukan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak dari Bulan November 2024 ke bulan September 2024?

KPU Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan antara lain:

- Menambah kekuatan SDM dengan merekrut Tenaga Kontrak dan Tenaga Ahli selama Masa Pilkada serentak.
- Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur yang berbeda bagi Pemilu atau Pilkada.
- Memulai persiapan sejak dini terkait pilkada seperti Penentuan Jumlah TPS, Proyeksi Daftar Pemilih Tambahan Pilkada, dsb.

12. SDM Penyelenggara Pemilu

Permasalahan Kepegawaian KPU Provinsi Jawa Tengah termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) saat ini. Minimnya jumlah PNS harusnya dapat ditunjang dengan jumlah PPNPN di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang mencukupi. Untuk pekerjaan rutin saja terbatas, terlebih saat memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan dirasa sangat kekurangan mengingat beban pekerjaan yang banyak.

Sedangkan untuk penambahan ASN dari Pemerintah Daerah, tidak ada. Karena KPU adalah Kementerian Lembaga vertikal, sehingga penambahannya di usulkan dan melalui persetujuan oleh Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

13. Konsekuensi Percepatan Pilkada

Jika terdapat percepatan pemajuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 2024 akan berdampak yaitu:

- Beban kerja KPU dan Badan Adhoc akan bertambah berat mengingat terjadi irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
- Kesiapan Regulasi akan kurang maksimal
- Kegiatan sosialisasi akan kurang maksimal

Selain itu, KPU Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan antara lain:

- Menambah kekuatan SDM dengan merekrut Tenaga Kontrak dan Tenaga Ahli selama Masa Pilkada serentak.
- Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur yang berbeda bagi Pemilu atau Pilkada.
- Memulai persiapan sejak dini terkait pilkada seperti Penentuan Jumlah TPS, Proyeksi Daftar Pemilih Tambahan Pilkada, dsb.

Bagi Bawaslu Jawa Tengah sendiri rencana pemajuan jadwal Pilkada serentak 2024 jadi diterangkan, dampak yang terjadi yaitu:

- Bawaslu harus segera menyiapkan pembaruan regulasi (jika regulasi yang lama sudah tidak relevan) yang terkait dengan Pengawasan Pilkada 2024.
- Bawaslu harus segera bergerak untuk membentuk Sentra Gakkumdu dalam rangka Pilkada.
- Bawaslu harus segera menyusun terkait strategi pengawasan, karena tahapan Pilkada yang maju berpotensi beririsan dengan tahapan akhir Pemilu 2024
- Jajaran Bawaslu (khususnya yang baru terpilih) harus segera menyesuaikan untuk memahami regulasi penanganan pelanggaran Pilkada, yang terdapat perbedaan dengan penanganan pelanggaran Pemilu 2024

IV. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah melalui Pj Gubernur Jawa Tengah yang mendukung anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 melalui penandatanganan NPHD yang sudah dilakukan dengan KPU dan Bawaslu se-Jawa Tengah, yang hanya menyisakan dua Kabupaten di Jawa Tengah (yakni Kabupaten Pematang dan Pati) dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam rangka persiapan menuju Pemilu Serentak 2024, Komisi II DPR RI mengharapkan komitmen dan dukungan pejabat kepala daerah yang ada di Jawa Tengah untuk menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah dengan tidak memihak dalam hal politik dan kepentingan golongan tertentu selama masa tugasnya untuk memastikan pelayanan publik yang profesional dan terbaik di Jawa Tengah.
3. Komisi II DPR RI, meminta kepada penyelenggara pemilu, untuk memaksimalkan DPT dan juga DPTb. Hal ini mengingat betapa pentingnya hak pilih warga negara serta kemudahan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Penyelenggara Pemilu dan seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang ada di Jawa

Tengah, harus lebih aktif dan proaktif dalam melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik itu, terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang sudah punya hak pilih pada 14 Februari mendatang.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 November 2023

Ketua Tim

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI

Saan Mustopa, M.Si.

A-367

Lampiran:









